

## **MASYARAKAT ISLAM SUKSES MENYEBARKAN ISLAM RAHMAT LIL'ALAMIN**

**Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph. D**  
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

### **Pendahuluan**

Wacana keagamaan kembali mengemuka ketika masyarakat dunia memasuki millennium ketiga. Gejala penguatan agama tidak bisa dilepaskan dari krisis modernitas yang tengah melanda masyarakat. Modernitas selain mendatangkan kemanfaatan bagi sebagian masyarakat tetapi juga mengandung berbagai paradoks, dehumanisasi dan alienasi.

Kompleksitas kehidupan keagamaan saat ini dihadapkan pada era disrupsi yang dikaitkan dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Era disrupsi mengakibatkan terjadinya perubahan radikal dalam bidang kehidupan keagamaan. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan suatu perubahan radikal yang sangat cepat dan mengakibatkan efek domino yang luar biasa massif, termasuk dalam perilaku beragama. Internet telah mengubah pola perilaku beragama.

Dalam konteks era digital ini, meskipun konten di media sosial lebih mudah diakses dan disajikan dalam bentuk yang menarik, namun informasi benar dan salah kian campur aduk tak terkendali. Ini berdampak serius ketika menyangkut konten agama, apalagi hal ini juga didukung oleh perubahan sikap masyarakat yang serba instan.

Masyarakat cenderung menyukai judul berita yang bersifat provokatif dan heboh. Kebanyakan masyarakat langsung mempercayai isi konten yang terdapat pada berita tanpa melakukan verifikasi. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya berita hoaks (hoax) beredar di mana-mana. Ia dapat mereduksi nilai mulia agama. Selain merebaknya kasus hoaks, wajah ganda internet juga memberi ruang penyebaran konten kebencian dengan

mengatasnamakan agama. Bahkan konten-konten ini menyusup dalam konten yang bermuatan pendidikan agama.

Suka atau tidak suka, era disrupsi digital ini mendorong lahirnya kompleksitas masyarakat dalam beragama. Akibat dangkalnya sumber pengetahuan agama, ada yang terlalu tekstual dalam memahami ayat-ayat suci disertai fanatisme berlebihan sehingga mengarah pada eksklusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Ada yang kebablasan menafsirkan isi kitab suci. Semua persimpangan itu rentan menciptakan konflik yang dapat merusak keharmonisan kehidupan bersama.

Untuk kepentingan inilah, majlismudhakarrah ini diadakan untuk mencermati peranan agama dalam memperkuat stabilitas sosial masyarakat, teks-teks agama dan model Nabi yang harmoni diantara kelompok yang berbeda, serta upaya pemerintahan Indonesia dalam melakukan moderasi beragama.

### **Islam Kultural untuk Perkuat Stabilitas Sosial Masyarakat**

Para ulama Asia Tenggara masa lalu telah berhasil mengenalkan agama Islam secara santun, tanpa kekerasan kepada penduduk lokal di berbagai negara kawasan ini. Keberhasilan atas pendekatan yang moderat ini dibuktikan dengan Islam menjadi agama dengan pemeluk terbesar di kawasan ini.

Bentuk penerimaan masyarakat di wilayah ASEAN terhadap budaya yang dibawa ulama Jawi dari Timur Tengah adalah terserapnya bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Denys Lombard (2005) dalam *Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia* memperkirakan ada 3.000 peristilahan Melayu yang berasal dari bahasa Arab dan Arab-Parsi.

Islam wasathiyah. Kata ini pernah diberi catatan oleh para perwakilan dalam pertemuan negara-negara yang tergabung dalam MABIMS (Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura) di Brunei tahun 2017 dengan menyatakan kata itu mempunyai makna reduktif terhadap peran Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* di muka bumi.

Makna kata Islam wasathiyah secara harfiah adalah 'Islam tengah-tengah'. Kalau diplesetkan, kata ini bisa dipahami secara salah menjadi "Islam setengah-setengah". Saat itu dikoreksi kata yang tepat untuk menggantikan Islam wasathiyah adalah Islam mutawasith yang artinya 'Islam yang menengahi', 'bijak'. Makna yang terakhir ini pas diterjemahkan dengan Islam moderat.

Terkait gagasan Islam moderat di ASEAN, Azra (2005) menyebutkan, dua ciri paling penting dari jaringan ulama atau disebut ulama Jawi sampai nusantara adalah telaah hadis dan tarekat. Melalui telaah-telaah hadis, para guru dan murid dalam jaringan ulama menjadi terikat satu sama lainnya dan menghasilkan inspirasi dan wawasan mengenai cara memimpin masyarakat Muslim menuju rekonstruksi sosio-moral. Di sisi lain, pendekatan tarekat menyebabkan transmisi agama lebih berjalan moderat dan pada gilirannya mendorong para tokoh dalam jaringan ulama tersebut lebih mendapatkan apresiasi lebih baik di kawasan ini.

Terlepas dari keberhasilan ulama Jawi di atas, sekarang ada persoalan yang lebih penting dan serius, yaitu kemungkinan ancaman radikalisme agama, intoleransi, dan terorisme yang membayangi kawasan ini.

Di satu sisi, gencarnya arus informasi yang menyebarkan paham keagamaan transnasional yang kurang berpihak dengan gagasan negara bangsa. Di sisi lain, media mampu mengangkat isu lokal tentang ketidakadilan atau isu sosial lainnya menyebabkan agama sering dipelintir menjadi bumbu konflik.

Pembentukan perhimpunan negara-negara ASEAN yang berhasil di Bangkok, Thailand, tahun 1967 tampaknya saat itu baru berhasil menyatukan geopolitik, tidak sertamerta diikuti ranah ekonomi dan budaya. Baru sekitar 50 tahun kemudian komunikasi di luar politik dimulai dengan gagasan penyatuan ekonomi melalui pembentukan MEA. Momentum ini memberi kesempatan negara-negara ASEAN untuk membangun komunikasi sosial-budaya lebih luas. Gagasan mendorong moderasi beragama kepada

negara dan masyarakat ASEAN menjadi peluang strategis untuk membangun komunikasi agama dan budaya lebih luas di wilayah ini (Murtadlo dan Basri, 2019).

Sebagai bangsa yang plural dan multicultural, Indonesia memiliki beberapa pengalaman empiric dalam moderasi beragama. Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar semua agama, mulai Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Arsitektur rumah ibadah satu agama tidak pernah alergi pada corak atau motif arsitektur yang dipengaruhi oleh agama lainnya. Selain modal social yang dimiliki Indonesia seperti budaya gotong royong dan budaya bermusyawarah. Indonesia juga seringkali berperan sebagai penengah atas konflik yang terjadi di kawasan serta best practice toleransi beragama yang berkembang di masyarakat (Lukman Hakin Saifuddin, 2019).

### **Teks Agama, Model Nabi, dan Harmoni Masyarakat**

Dalam buku “Tafsir Tematik Moderasi Beragama” disebutkan bahwa ada beberapa kata dalam Al-Quran yang memberikan isyarat pada pengertian masyarakat. Kata-kata itu antara lain: ummah, qaum, syu’ub, dan qabail. Ummah dalam bahasa Indonesia ditulis dengan umat diartikan “para penganut (pemeluk atau pengikut) nabi, suatu agama, atau bisa juga diartikan makhluk manusia.” Dalam terminologi yang lain berarti umat manusia, bangsa manusia, atau masyarakat manusia.

Terdapat 10 kriteria dari ragam masyarakat menurut versi Al-Qur’an: masyarakat muttaqun, mu’minun, muslimun, muhsinun. Semuanya kriteria ini positif. Sedang enam lainnya bersifat negatif: kafirun, munafiqun, fasiqun, ‘alimun, dan mutrafun.

Masyarakat muslimin adalah masyarakat yang teosentris dan beretika religius. Masyarakat yang satu bersaudara, penengah, adil, pilihan, seimbang, saling tolong-menolong, suka musyawarah, dan menempatkan manusia dalam derajat dan harkat yang sama.

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjadi figur central dalam model dan potret masyarakat Medinah, yang terbagi kepada empat aspek, yaitu akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Akhlak yang sifatnya individu, yaitu persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan. Sedang akhlak yang sifatnya sosial adalah hubungan dengan non-muslim dan ditegakkannya keadilan sosial. Pilar-pilar tersebut sekaligus potret masyarakat Medinah yang telah dicanangkan Nabi Muhammad kepada sahabatnya di Medinah.

Dalam Al-Qur'an, ada dua gelar yang diberikan kepada masyarakat Medinah, khususnya para sahabat Nabi, yaitu ummat wasatan dan khair ummah, sebagai generasi awal, pilihan, dan terbaik. Seperti tercantum dalam Surah al-Baqarah/2: 143, dan Āli 'Imrān/3: 103.

Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan ('adalah), keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuh). Konsep keadilan, keseimbangan, dan toleransi adalah bagian dari paham ahlus-sunah wal-jama'ah (aswaja). Pemikiran Islam Sunni sesungguhnya bersumber dari pergulatan pemikiran yang telah dirumuskan oleh Imam al-Hasan Asy'ari (w. 260 H/ 873 M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 324 H/935 M) di bidang akidah, dan mengikuti salah satu mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) pada bidang syari'ah, dan dalam bidang tasawwuf mengikuti al-Gazali dan al-Junaid al-Bagdadi.

Adapun salah satu karakter aswaja adalah selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi, oleh karena itu aswaja tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apa lagi ekstrim. Sebaliknya aswaja bisa berkembang dan sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemapanan yang sudah kondusif. Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacupada paradigma dan prinsip ash shalih wa al Ashlah, karena hal tersebut merupakan implementasi dari kaidah al-muhafadhatu 'ala al qadimil ash Shalih wa al Akhdu bi al Jadid al Ashlah, termasuk upaya menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang akan datang, yakni pemekaran relevansi implementatif pemikiran dan gerak kongkrit ke dalam

semua sektordan bidang kehidupan, baik akidah, syari'ah, akhlak, sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya.

Ada yang beranggapan bahwaaswaja itu sebenarnyajukanlah mazhab, tetapi hanyalah*manhajul-fikr* atau metodeberpikir saja, yang di dalamnya masih memuat beberapa alirandan mazhab. Ini berarti masih terbuka luas bagi kita wacanapemikiran Islam yang transformatif, kreatif, dan inovatif, sehinggadapat mengakomodir nuansa perkembangan kemajuan budaya manusia yang selalu uptodate dan tanggap terhadap tantanganzaman. Jika tidak demikian, maka akan terjadi kebekuan dankevakuan besar-besaran diantara kita kalau doktrin-doktrineksklusif yang ada dalam aswaja seperti yang selama ini kitadengar dan kita pahami dicerna mentah-mentah sesuai dengankemasan praktis pemikiran aswaja, tanpa mau membongkarsisi metodologi berpikirnya, yakni kerangka berpikir yangmenganggap prinsip keadilan ('adalah), keseimbangan (tawazun),dan toleransi (tasamuh), dapat mengantarkan pada sikap yangmau dan mampu menghargai keberagaman yang non ekstrimitas(tatarruf) kiri atau pun kanan.

### **Strategi Penguatan dan Implementasi**

Kementerian agama sebagai lembaga negara sesuai dengan PMA NO 42 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Indonesia sekalipun bukan negara agama, namun memposisikan agama dalam posisi yang sangat tinggi yaitu sebagai salah satu sumber nilai-nilai dalam berbangsa. Karena itu dalam mensikapi dinamika keagamaan di negara ini, pemerintah Indonesia lebih memposisikan sebagai mediator, titik temu dan titik simpul dari kesadaran warganya dalam beragama dan berbangsa.

Kementerian Agama Indonesia lebih mengutamakan sikap keberagaman yang moderat dalam setiap program pembangunannya. Menteri Agama belakangan

menegaskan kembali peran kementerian ini dalam mensikapi munculnya berbagai paham keagamaan yang ekstrim seperti paham keagamaan yang cenderung tekstualis.

Untuk membangun pemahaman keagamaan yang moderat, maka dibutuhkan langkah-langkah memperjuangkan moderasiagama. Moderasi itu artinya proses menuju moderat lawan dari ekstrim, Kementerian Agama Indonesia tidak ingin di negara Indonesia ada paham apalagi pengamalan agama yang ekstrim atau berlebihan.

Upaya penguatan moderasi beragama dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, setidaknya melalui 3 (tiga) strategi, yakni: a) sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama; b) pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengingat; dan c) pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sebelumnya, Kementerian Agama terus melakukan langkah-langkah penanggulangan menyebarnya pemahaman ekstrim, radikal, dan gerakan terorisme melalui kerjasama lintas kementerian dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kemenag dengan Kemendikbud dan BNPT tentang Pencegahan Penyebaran Paham Radikal dan Intoleransi, di Jakarta, Kamis (19/07/2018).

Melalui Badan Litbang dan Diklat, Kementerian agama mendiseminasikan dan mempromosikan Islam wasathiyah ke dalam dan luar negeri. Ke dalam negeri dengan melakukan pendidikan dan latihan bagi peserta diklat, ke luar negeri melalui Halaqah Ulama Asean yang diselenggarakan di Bogor, 17-19 Oktober 2016 yang dihadiri utusan dari Malaysia, Brunai, Singapura dan Thailand yang menghasilkan Komitmen Bogor yang poin pertamanya: *“Mensosialisasikan Islam Wasathiyah sebagai penjabaran Islam rahmatan lil alamin.”*

Melalui pesantren, Kementerian agama mendorong terus agar pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang otentik nusantara menjaga dirinya untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal Islam wasathiyah sebagaimana yang diperankan oleh

“Ulama Jawi” terdahulu dalam mengembangkan Islam yang damai di wilayah yang saat ini disebut Asean ini.

Melalui perguruan tinggi, Kementerian Agama membuat pusat kajian moderasi kajian agama Islam dalam rangka merespon sedang terjadi proses radikalisme. Melalui pendidikan sekolah, Kemenag telah mengambil langkah antisipatif diantaranya dengan melatih 10 ribu guru dan pengawas agar bisa memberikan pemahaman Islam yang moderat.

Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama mengajak umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu untuk terus mengembangkan paham keagamaan yang moderat dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **Penutup**

Sebagai penutup, pengalaman Indonesia telah melakukan upaya beragama yang rahmatan lil alamin. Tujuan pembuatan kebijakan public dalam penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama.

Singapura, November 2019